

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	5
Kedudukan, Tugas dan Fungsi	6
Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	8
Landasan Hukum.....	9
Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis.....	11
Perencanaan Kinerja	12
Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Organisasi.....	18
Analisis Capaian Kinerja	18
Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	32
Rekomendasi.....	33
LAMPIRAN	
Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Kudus.....	
.....	
Tabel Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2021	
Perjanjian Kinerja	
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .	14
Tabel 2.2	: IKU BPPKAD Tahun 2021	15
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD dan Eselon III	16
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Kinerja	21
Tabel 3.2	: Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 3.3	: Realisasi Capaian Kinerja	21
Tabel 3.4	: Realisasi Kinerja serta capaian kinerja 3 tahun terakhir	24
Tabel 3.5	: Capaian Kinerja tahun 2021 dengan target renstra tahun 2023	27
Tabel 3.6	: Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2021	28
Tabel 3.7	: Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	29
Tabel 3.8	: Sarana Prasarana di BPPKAD	30
Tabel 3.9	: Alokasi Anggaran BPPKAD	28
Tabel 3.10	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3.11	: Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja	29
Tabel 3.12	: Anggaran dan Realisasi Belanja BPPKAD Tahun 2021.....	30

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/158/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Peringkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Kudus, 16 Februari 2022
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS,


EKO DJUMARTONO, SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 196810041993031006

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya *dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.*

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melaksanakan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas kinerja BPPKAD bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan atas target dan realisasi berdasarkan capaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, RKPD Tahun Anggaran 2021 dan DPA BPPKAD Tahun Anggaran 2021. LKjIP juga memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPPKAD.

Dengan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Diketuainya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Diketuainya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik.

Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175), serta Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Bahwa dengan diaturnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah diharapkan penyelenggaraan pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan optimal.

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;

- e. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- f. Penyelenggaraan administrasi Badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- g. Penyelenggaraan administrasi badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- h. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah ;
- i. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;
- j. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi BPPKAD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi :
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Pendapatan membawahi :
 - Kasubbid Perencanaan dan Penetapan
 - Kasubbid Penagihan dan Keberatan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Anggaran membawahi :
 - Kasubbid Anggaran Pemerintahan dan Sosbud
 - Kasubbid Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Akuntansi membawahi :
 - Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud
 - Kasubbid Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah
 - Kasubbid Belanja Langsung
 - Kelompok Jabatan Fungsional

7. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah
 - Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah
 - Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kepala UPTD Pengelola Pajak Daerah : Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
 - Kepala Subbag. Tata Usaha

Struktur Organisasi

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus pada lampiran.

Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dimaksudkan agar pelayanan perangkat daerah mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pengguna layanan. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi diperoleh gambaran pelayanan perangkat daerah.

Isu- isu strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Reformasi Keuangan daerah, mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas, sebagai untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran
2. Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Tranparansi informasi dan penggunaan Teknologi Informasi (IT) diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Transparansi informasi mencakup informasi penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan keuangan daerah
4. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan aset-aset daerah.

Adapun permasalahan utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Belum optimalnya PAD
2. Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses penganggaran daerah
3. Belum tertibnya pengajuan SPM sesuai ketentuan
4. Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah
5. Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
5. Rencana Strategis (Renstra) Nomor 050.1337.2/25.01/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Sistematika

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Struktur Organisasi

Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Landasan Hukum

Sistematika

Bab II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis

Rencana Kinerja

Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Kesimpulan

Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan visi untuk 5 tahun ke depan dalam masa jabatannya yaitu tahun 2018 – 2023. Adapun tujuan dan perlunya menelaah Visi, Misi dan Program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah untuk :

- Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
- Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.

Prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018 - 2023 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah : **KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELEGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA.**

Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 : Kudus yang Relegius, Maju dan Adil.
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari.
3. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, BPPKAD mempunyai fungsi penunjang di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*.

1. Visi dan Misi

Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera.

Misi 2, Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

2. Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera							
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU	Target Kinerja Pada Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,60%	16,70%	16,83%	16,94%	17,04%
		Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	4,34%	3,01%	3,25%	3,25%	3,29%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	92,30%	93,40%	93,60%	93,70%	94,00%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75	80,1	80,2	80,3	80,4

Perencanaan Kinerja

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang merupakan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.2
IKU BPPKAD Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU	Satuan	Target
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	16,83
			Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	%	100
		1.1 Meningkatkan PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	%	3,25
		1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	93,60
		1.3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Indeks	80,2

Perjanjian Kinerja

Adalah tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Wujud nyata komitmen;
3. Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; dan
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 telah melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA BPPKAD TAHUN 2021

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,70%
		Kualitas LKPD	100%
2.	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,01%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,40%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	83 Indeks
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dok
	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	29 Dokumen
	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang
	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	167 Jenis
	Jumlah mebel, perlengkapan dan peralatan gedung kantor	21 Unit
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3 Jenis
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	184 Unit

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
2	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen
	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	8 Dok
3	rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen
	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	7 Dok
4	capaian realisasi pembayaran belanja PD	95 persen
	Jumlah dokumen, SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan daerah	3 Jenis
	Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 Tahun
5	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90 persen
	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	14 Dok
6	persentase realisasi PAD	100 persen
	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	21 Dok

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	persentase realisasi PAD	100%	1.760.096.000
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	944.245.000
		capaian realisasi pembayaran belanja PD	95%	94.701.000
		rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	561.947.500
		Belanja Transfer		284.903.539.635
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	1.233.222.300
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diampu oleh Sekretariat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	83 Indeks	16.618.253.112

Dalam melaksanakan tupoksinya, BPPKAD melaksanakan inovasi-inovasi sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain :

1. SISWAIPDA (Sistem Informasi Status Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah)

- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala bidang pendapatan mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah.
- Kondisi saat ini, belum ada integrasi pajak daerah dengan pelayanan perijinan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Koordinasi yang diharapkan dengan terintegrasinya pajak daerah dengan pelayanan perijinan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

Tujuan dengan adanya aplikasi SISWAIPDA ada integrasi sistem perijinan dengan data base pajak daerah sehingga dapat mendongkrak PAD.

Manfaat Aplikasi SISWAIPDA antara lain :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi SOP pelayanan pajak daerah.

- b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelayanan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - c. Memudahkan dan mempercepat proses konfirmasi status wajib pajak daerah bagi masyarakat.
2. SIM-RKBMD (Sistem Informasi Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Aset antara lain adalah menyusun rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD, pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan kebutuhan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati, mengatur pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan kebutuhan BMD.

Kondisi saat ini, penyusunan RKMD belum sesuai dengan rencana kerja dan masih dilaksanakan secara manual. Kondisi yang diinginkan penyusunan RKMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD sesuai dengan rencana kerja dan dilaksanakan dengan sistem aplikasi (SIM-RKBMD).

Tujuan aplikasi SIM-RKBMD adalah SIM-RKBMD dapat diimplementasikan guna meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran daerah.

Manfaat SIM-RKBMD antara lain :

1. Membantu Pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
2. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan manajemen aset daerah khususnya dalam penyusunan RKBMD dan pemeliharaan BMD
3. Masyarakat ikut serta dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan RKBMD dan pemeliharaan BMD.

Aplikasi SISWAIPDA

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS

- Informasi Wajib Pajak
- Informasi objek pajak
- Konfirmasi status pajak reklame
- Konfirmasi status pajak BPHTB
- Konfirmasi status pajak PBB
- Statistik realisasi pajak

SISWAIPDA
SISTEM INFORMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN KUDUS
<https://siswaipda.kuduskab.go.id/>

PAJAK LUNAS, PERIJINAN LANCAR

peppkad@gmail.com @ppkadkab @ppkadkab.go.id #ppkadKabKudus @ppkadkab.kudus

Aplikasi SIM-RKBMD

PEREMINTAH KABUPATEN KUDUS

Dashboard interface showing a hand interacting with a tablet displaying a lock icon, surrounded by gears and icons representing financial and administrative functions.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun skala nilai pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

No.	Skala pengukuran capaian kinerja	Kategori
1	$\geq 90,1\%$	Sangat tinggi
2	75% - 90%	Tinggi
3	65% - 75%	Sedang
4	50,1% - 65%	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

III.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Keselarasan Renstra BPPKAD dengan RPJMD terkait dengan Misi ke 2 adalah mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik, yang salah satu sarasannya adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan, terjadi hal-hal yang tidak bisa diprediksikan (*force major*), sehingga banyak terjadi perubahan, seperti perubahan Renstra, perubahan Regulasi, perubahan setelah dievaluasi Kemenpan, IKU yang tidak SMART, sehingga target 5 (lima) tahunan dalam Renstra BPPKAD ada beberapa yang tidak tercapai.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus dapat diukur dengan indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	PAD dibagi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dikali 100%
		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Hasil Reviu Inspektorat
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	PAD Tahun ini dikurangi PAD Tahun lalu dibagi PAD Tahun lalu dikali 100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	Jumlah target program dibagi jumlah program dikali 100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil evaluasi dari Inspektorat

1. Perbandingan target dan realisasi pengukuran capaian kinerja tahun ini sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,83%	31,04%	184,43%	Sangat tinggi	BPPKAD
		Kualitas LKPD	100%	Proses	-		
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	32,18%	990,15%	Sangat tinggi	BPPKAD
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,60%	95,58%	102,11%	Sangat tinggi	BPPKAD
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2	Proses	-		

Berdasarkan hasil tabel 3.3 pencapaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkategori Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar lebih dari 425,56%. Tingginya angka hasil pengukuran sasaran tersebut dikarenakan pada penetapan target Renstra (2018-2023) BPPKAD menyesuaikan trend realisasi tahun sebelumnya belum menggunakan kajian potensi pendapatan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 BPPKAD melaksanakan Misi 2 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik dengan menetapkan 4 sasaran strategis yaitu :

a. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

➤ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dan potensi serta kendala yang ada, sehingga diharapkan tercapai peningkatan kemandirian keuangan daerah dan tidak tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan struktur pendapatan daerah Kabupaten Kudus menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer. Berikut tabel rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2021 pada lampiran.

➤ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan BPPKAD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain memuat :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan arus kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

b. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam merencanakan Pendapatan Asli Daerah, mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 507.243.117.542 mengalami kenaikan sebesar Rp.139.923.811.153 dari target sebesar Rp.367.504.396.000 dibandingkan realisasi PAD tahun 2020 dari sebesar Rp. 343.827.208.844 Kenaikan yang signifikan bersumber dari pajak daerah sebesar Rp.148.636.766.896 sisanya disumbang dari retribusi daerah Rp.25.754.628.244 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 324.665.586.523.

c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi untuk menilai tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) BPPKAD tahun 2021 masih menggunakan formulasi penghitungan jumlah target program masing-masing bidang (anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan aset) dibagi jumlah bidang diperoleh angka rata-rata.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2020 tentang IPKD, ada 6 (enam) dimensi penilaian meliputi : Dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengeluaran keuangan daerah, dokumen penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini BPK. Formulasi penghitungan IPKD adalah menjumlahkan seluruh indeks pada setiap dimensi. Dari 6 dimensi diperoleh angka / nilai dan dengan standar deviasi. Untuk Tahun 2020, IPKD Kabupaten Kudus memperoleh nilai 60,4567 masuk kategori B (perlu perbaikan). Untuk Tahun 2021 masih dalam proses.

d. Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD

Dari indikator nilai evaluasi SAKIP BPPKAD belum terealisasi dikarenakan masih dalam proses oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja 3 tahun terakhir (2019,2020 dan 2021).

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja 3 tahun terakhir

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,60%	16,80%	100,60%	16,70%	23,54%	140,96%	16,83%	31,04%	184,43%
		Kualitas LKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Proses	-
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	4,34%	1,9%	44,24%	3,01%	11,65%	387,043%	3,25%	32,18%	990,15%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	92,3%	92,5%	100,22%	93,40%	99,89%	106,94%	93,60%	95,58%	102,11%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75	76,77	102,36%	80,10	72,88	90,99%	80,2	Proses	-

Pada tabel 3.4 Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020 terhadap Target BPPKAD adalah sebagai berikut :

Pada sasaran strategis meningkatkan kemandirian keuangan, kontribusi realisasi PAD terhadap Pendapatan Transfer yang semula Dana Perimbangan, tahun 2021 dibandingkan realisasi PAD Tahun 2020, Kontribusi PAD Tahun 2021 sebesar Rp.507.243.117.542 atau 31,04% meningkat dibandingkan realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp.383.882.354.129 atau 19,83% terhadap total pendapatan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kemandirian keuangan daerah :

- Proporsi Pendapatan Transfer masih paling besar dalam struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap Pendapatan Transfer. Kontribusi PAD dalam mendukung pendapatan daerah masih sangat kecil (31,04%).
- Dalam menetapkan target pendapatan, belum disertai dengan kajian/analisa potensi pendapatan, hanya berdasarkan tren kenaikan pendapatan per tahun.
- Belum optimalnya pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah (BUMD) untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Strategi yang akan datang :

- Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggali sumber-sumber PAD potensial melalui penerimaan yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- Menyusun kajian / analisa potensi pendapatan secara bertahap baik potensi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah bekerjasama dengan pihak ketiga.
- Mengoptimalkan pengelolaan perusahaan-perusahaan daerah BUMD dan BLUD dengan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari Opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari dari : Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun BPPKAD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain memuat :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dilakukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah guna memenuhi ketentuan tersebut di atas. LKPD Kabupaten Kudus pada tahun 2020 memperoleh Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat diyakini kewajarannya oleh BPK, sedangkan LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 masih dalam proses.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dari target sebesar Rp.367.504.396.000 terealisasi sebesar Rp.507.428.207.153 dibandingkan realisasi tahun 2020 dari sebesar Rp. 383.882.354.129. Kenaikan tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp.148.636.766.896, sisanya disumbang dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.324.665.586.523.

Permasalahan yang dihadapi untuk peningkatan PAD antara lain :

- Pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor perekonomian, khususnya dari sisi penerimaan pajak daerah, meskipun tahun ini sudah menunjukkan perbaikan ekonomi.
- Masih adanya kebocoran-kebocoran dari penerimaan pendapatan daerah yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- Keterbatasan kompetensi SDM pengelola pendapatan daerah dan keuangan daerah.
- Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak daerah

Strategi yang akan digunakan untuk peningkatan PAD :

- Memperkuat dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, diantaranya penyesuaian NJOP PBB P2, serta melakukan inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng, di tiap-tiap kecamatan, melakukan pemasangan tapping box yang ditempatkan di cash register di Hotel/ Restoran yang relatif besar.
- Meminimalkan kebocoran-kebocoran pendapatan pajak daerah/ retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode non tunai dalam transaksi pendapatan daerah dan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- Peningkatan kapasitas kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis seperti Bintek/ Diklat tentang perpajakan, bintek pengelolaan keuangan daerah.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/ pembentukan Tim dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan salah satunya dengan Badan Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan serta menerapkan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (tapping box) dalam pengawasan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah BPPKAD Formulasi penghitungan IPKD adalah menjumlahkan seluruh indeks pada setiap dimensi. Dari 6 dimensi diperoleh angka / nilai dan dengan standar deviasi. Untuk Tahun 2020, IPKD Kabupaten Kudus memperoleh nilai 60,4567 masuk kategori B (perlu perbaikan). Untuk Tahun 2021 masih dalam proses.

Nilai evaluasi SAKIP BPPKAD

Dari indikator nilai evaluasi SAKIP BPPKAD Tahun 2021 belum terealisasi dikarenakan masih dalam proses oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. Untuk nilai SAKIP Tahun 2020, diperoleh hasil 72,88, menurun dibandingkan nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 76,77.

3. Perbandingan realisasi indikator serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target renstra tahun 2023.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja tahun 2021 dengan target renstra tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Renstra 2023	% Capaian kinerja	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	31,04%	17,04%	182,16%	Sangat tinggi
		Kualitas LKPD	Proses	100%	Proses	Proses
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	32,18%	3,29%	978,11%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	95,58%	94,00%	101,68%	Sangat tinggi
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Proses	80,4	Proses	Proses

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target Renstra 2023 yang ditetapkan BPPKAD dalam mencapai indikator kinerja tahun 2021 dengan kategori sangat tinggi karena beberapa hal diantaranya adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf BPPKAD untuk berkinerja terbaik, serta didukung pendanaan, sistem/aplikasi berbasis teknologi dan dukungan dari semua stakeholder.

Namun disisi lain masih terdapat beberapa pemasalahn antara lain kurangnya kompetensi SDM pengelola keuangan/pajak.

4. Keberhasilan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021;

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,83%	31,04%	140,95%		
		Kualitas LKPD	100%	Proses	-		
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	32,18%	387,04%		
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,60%	95,58%	106,94%		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2	Proses	-		

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja.

Capaian kinerja BPPKAD tergolong sangat tinggi dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

- Adanya dukungan dari pimpinan dan seluruh staf untuk berkinerja terbaik dan berkomitmen
- Dukungan dan semua stakeholder (Pemda, Masyarakat dan SKPD)
- Adanya sistem/aplikasi berbais teknologi informasi yang mendukung kinerja organisasi

Namun di sisi lain masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- Kurangnya kompetensi SDM dibidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajak daerah
- Kurangnya akurasi data perencanaan pendapatan

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbendaharaan adalah :

- Mengusulkan pemenuhan formasi ASN dengan kompetensi tersebut kepada BKPP dan mengoptimalkan tenaga kontrak
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui keikutsertaan diklat-diklat teknis pengembangan SDM
- Membangun dan mengembangkan sistem/aplikasi based data pendapatan dan keuangan
- Menyusun kajian potensi pendapatan daerah

5. Efisiensi penggunaan sumber daya;

Capaian efisiensi anggaran diperoleh dari sumber daya aparatur BPPKAD sebagai berikut :

Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebanyak 87 orang terdiri dari PNS : 74 orang dan PHD : 1 orang, 12 tenaga kontrak.

Tabel. 3.7
Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bagian/Bidang/Sub. Bagian/Seksi	Pendidikan						Jml	Ket.
		PS	S	SM	SLA	SLP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1	
	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Subbag.Umum dan Kepegawaian	-	1	-	2	-	1	4	
2.	Subbag. Keuangan	-	2	2	1	-	-	5	
3.	Subbag. Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1	1	-	-	-	-	2	
	Kabid. Pendapatan	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Seksi Perencanaan	1	3	-	-	-	-	7	
2.	Seksi Pendataan dan Pendaftaran	-	2	-	2	-	-	4	
3.	Seksi Penetapan, Penagihan dan Keberatan	-	1	2	7	-	-	15	
	Kabid. Anggaran	1	-	-	-	-	-	1	
1.	Seksi Anggaran Praswil	-	3	-	1	-	-	4	
2.	Seksi Anggaran Pemsosbud	1	2	-	1	-	-	5	
	Kabid. Perbendaharaan	-	1	-	-	-	-	1	
1.	Seksi BTL	1	5	-	4	-	-	9	
2.	Seksi BL	-	2	1	1	-	-	5	
	Kabid. Akuntansi	-	-	-	-	-	-	1	
1.	Kasi. Akuntansi Praswil	-	4	-	-	-	-	4	
2.	Kasi. Akuntansi Pemsosbud	1	3	-	1	-	-	4	
	Kebid Aset	1	1	-	-	-	-	1	
1	Subbid Pemberdayaan	-	3	-	-	-	-	3	
2	Subbid Perencanaan	-	2	-	1	-	-	3	
3	Subbid Penatausahaan	-	2	-	-	-	-	2	
	Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD)	-	1	-	-	-	-	3	
	Pengelola Pajak Daerah	-	3	-	1	-	-	4	
		8	37	6	22	-	1	74	

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui Latar belakang pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 22 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 6 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 37 Orang dan Pascasarjana (S2) sebanyak 8 Orang. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana (S1) sebesar 37 Orang.

Dalam hal sarana prasarana di BPPKAD saat ini cukup memadai, hanya perlu pengembangan/inovasi dari aplikasi yang sudah ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang nyaman tersebut mampu mendorong pegawai untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Berikut tabel sarana dan prasarana (aset) BPPKAD :

Tabel 3.8
Sarana Prasarana BPPKAD

No.	Nama Barang	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	6.650.955.489,57
2.	Bahan Perpustakaan	9.872.500,00
3.	Aset tidak berwujud	311.030.000,00

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana, ketersediaan dana anggaran sangat penting dalam melaksanakan Tupoksi BPPKAD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Alokasi Anggaran BPPKAD

No.	Tahun	Jumlah Anggaran	Sumber Data
1.	2019	22.449.453.000	APBD
2.	2020	20.529.498.000	APBD
3.	2021	306.116.064.547	APBD

Pada tahun 2021, terdapat penambahan anggaran yang cukup besar sebesar Rp.290.607.159.000 karena BPPKAD melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, pengelolaan penyaluran bantuan keuangan, Dana darurat dan Bagi Hasil Kabupaten. Berdasarkan sumber daya di atas berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya pada BPPKAD Kabupaten Kudus.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,83%	31,04%	140,95%	1.720.096.000	1.649.400.862	93,71%	13,24%
2	Kualitas LKPD	100%	Proses	-				Proses
3	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	32,18%	387,04%				-197,98%
4	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,60%	95,58%	106,94%	287.737.655.435	279.196.897.168	97,03%	-1,52%
5	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2	Proses	-	16.618.253.112	14.973.091.636	90,10%	Proses
Jumlah				211,64%			93,61%	-62,08%

Berdasarkan tabel 3.9 efisiensi anggaran dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran, Tahun 2021 capaian kinerja sasaran sebesar 211,64%, sedangkan capaian realisasi anggaran sebesar 96,63%. Dengan demikian maka kategori pelaksanaan anggaran adalah efisien sebesar -62,08%. Dimana capaian kinerja sasaran rata-rata mencapai diatas realisasi anggaran.

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, berikut tabel program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Tabel 3.11
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	140,95%	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi PAD	106,56%	Menunjang
		Kualitas LKPD	-				
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	387,04%	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Realisasi PAD	106,56%	Menunjang
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	106,94%	Program Pengelolaan Keuangan daerah	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Menunjang
					persentase rata-rata transparansi pengelolaan keuangan daerah	100%	Menunjang
					persentase penyerapan anggaran	82,3%	Menunjang
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	99,79%	Menunjang
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Proses	Menunjang

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 target indikator telah tercapai dan program/kegiatan telah menunjang sasaran yang telah ditetapkan.

REALISASI ANGGARAN

BPPKAD melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan anggaran sebesar Rp. 306.116.004.547 yang digunakan untuk melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi belanja BPPKAD tahun 2021.

Tabel. 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja BPPKAD 2021

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.618.253.112	14.973.091.636	90,1%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.100.000	21.617.000	61,58%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.525.534.762	14.213.824.744	91,55%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	12.080.000	80,53%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.302.600	195.355.875	68,23%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.812.000	19.350.000	81,26%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.515.750	442.893.480	88,14%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.988.000	162.657.803	70,72%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	286.504.433.135	278.113.241.828	97,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	944.245.000	821.111.690	86,96%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	94.701.000	84.402.678	89,13%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	561.947.500	462.487.500	82,30%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	284.903.539.635	276.745.239.960	97,14%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.233.222.300	1.083.655.340	87,87%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.233.222.300	1.083.655.340	87,87%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.760.096.000	1.649.400.862	93,71%
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	1.760.096.000	1.649.400.862	93,71%
	Total	306.116.004.547	295.819.389.666	96,63%

Penyerapan anggaran belanja tahun 2021 sebesar 96,63% dari total anggaran yang dialokasikan realisasi anggaran untuk melaksanakan 4 program 13 kegiatan. Apabila dibandingkan antara kinerja pencapaian sasaran 425,56% dengan penyerapan anggaran 96,63% menunjukkan dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran tahun 2021 telah mencukupi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus sebagai Badan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan suatu organisasi adalah komitmen yang kuat dari pimpinan dan didukung semua aparat Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2021 dilihat dari skala penilaian capaian kinerja semua target sasaran yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dengan target 16,70% dengan realisasi 23,54% dengan persentase capaian 140,95% sehingga capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
2. Meningkatnya PAD target 3,01% realisasi 11,65% persentase capaian 387,64% capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah target 93,40% realisasi 99,89% persentase capaian 106,94% capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD dengan target nilai 80,10 realisasi dalam proses evaluasi Inspektorat Kabupaten Kudus.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus selalu diupayakan untuk meningkat kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 BPPKAD Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang timbul pada BPPKAD Kabupaten Kudus, hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- Mengusulkan pemenuhan formasi ASN dengan kompetensi tersebut kepada BKPP dan mengoptimalkan tenaga kontrak
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui keikutsertaan diklat-diklat teknis pengembangan SDM
- Membangun dan mengembangkan sistem/aplikasi based data pendapatan dan keuangan
- Menyusun kajian potensi pendapatan daerah.

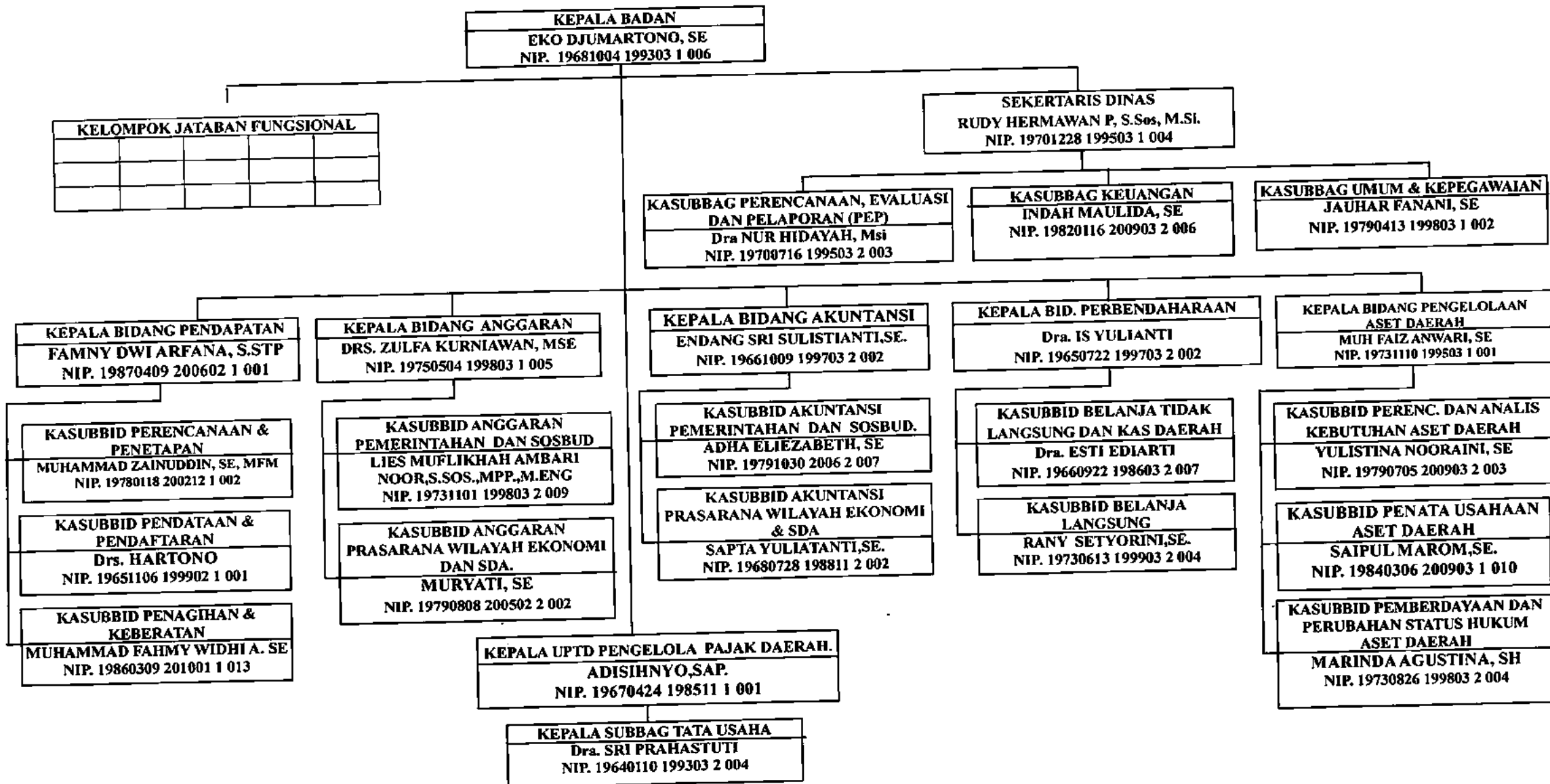
Kudus, 16 Februari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS**


EKO DJUMARTONO, SE.

Pembina Utama Muda
NIP.19681004 199303 1 006

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**



Tabel Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2021

NOMOR URUT	URAIAN	Realisasi				r (%)
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	
1	2	4	5	6	6	7
1	PENDAPATAN	1.996.530.094.357,00	2.090.430.364.413,00	2.014.962.476.485	2.141.964.999.077	2,02
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	337.364.609.424,00	343.824.122.868,00	383.884.186.229	507.428.207.154	9,48
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	114.155.438.957,00	125.762.587.800,00	126.240.575.956	148.636.766.896	9,53
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	18.367.332.884,00	20.058.448.046,00	18.493.582.321	25.754.628.245	8,30
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.574.356.302,00	9.277.166.654,00	8.704.409.157	8.371.225.490	(11,17)
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197.267.481.281,00	188.725.920.368,00	230.445.618.795	324.665.586.523	11,63
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.281.771.374.568,00	1.298.060.004.624,00	1.183.590.147.772	1.583.490.680.923	6,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	235.660.116.745,00	209.525.165.300,00	216.676.209.702	1.403.367.377.471	133,95
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	807.056.990.772,00	851.036.584.000,00	757.097.370.000	180.123.303.452	(20,47)
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	239.054.267.051,00	237.498.255.324,00	209.816.568.070	-	(4,84)
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	377.394.110.365,00	448.546.236.921,00	447.488.142.484	51.046.111.000	(11,69)
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	67.511.090.396,00	70.026.924.527,00	68.685.410.000	5.541.000.000	153,68
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	147.274.056.569,00	154.196.848.594,00	133.004.610.484	-	0,09
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	143.594.518.400,00	193.143.614.800,00	89.301.426.000	-	2,47
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.014.445.000,00	31.178.849.000,00	8.673.235.000	-	(17,92)
1 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	-	-	147.823.461.000	45.505.111.000	-



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus Kode Pos 59313
Telp (0291) 431328 Fax (0291) 434353
email : dppkdkabkudus@gmail.com Website : bppkadkuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO DJUMARTONO, SE
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH
Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 22 November 2021

Pihak Pertama,

EKO DJUMARTONO, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 196810041993031006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,83 %
2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Kualitas LKPD	100,00 Memadai
3	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25 %
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93,60 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.618.253.112	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	286.504.433.135	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.233.222.300	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.760.096.000	
	T O T A L	306.116.004.547	

Kudus, 22 November 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI KUDUS,



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH



EKO DJUMARTONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 196810041993031006

**RENCANA KERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021**

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)</i>	83,00 Indeks	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,00 Dok	SEKRETARIS
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun	3,00 Dok	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD yang tersusun	4,00 Dok	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun	8,00 Dok	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	29,00 Dokumen	SEKRETARIS
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	74,00 Orang	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	12,00 Orang	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan	29,00 Dok	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4,00 Orang	SEKRETARIS
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4,00 Orang	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	167,00 Jenis	SEKRETARIS
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat/bahan listrik	15,00 jenis	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Bahan/Alat Tulis Kantor	87,00 Jenis	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan alat rumah tangga	35,00 Jenis	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah minuman pegawai, makanan dan minuman jamuan tamu	14,00 Jenis	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (belanja cetak)	17,00 Jenis	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,00 Jenis	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	157,00 Orang	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah mebel, perlengkapan dan peralatan gedung kantor	21,00 Unit	SEKRETARIS
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1,00 Stel	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,00 Unit	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang	3,00 Jenis	SEKRETARIS
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan perangkat dan pengiriman surat	564,00 Lembar	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi	3,00 Rekening	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PHD dan tenaga kontrak	13,00 Orang	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	184,00 Unit	SEKRETARIS
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	129,00 Unit	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelur yang dirawat	15,00 Unit	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10,00 Unit	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Pertengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	30,00 Jenis	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	100,00 persen	KEPALA BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	8,00 Dok	KEPALA BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2,00 Dokumen	KASUBID ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2,00 Dokumen	KASUBID ANGGARAN PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen, SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan daerah	3,00 Jenis	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi ke pusat/provinsi dan Pengelolaan Kas Daerah	3,00 Kali	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN KAS DAERAH
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi	70,00 Laporan	KASUBBID BELANJA LANGSUNG
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D yang sesuai standar	6.954,00 SP2D	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN KAS DAERAH
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Juklak	1,00 Dokumen	KASUBBID BELANJA LANGSUNG
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	7,00 Dok	KEPALA BIDANG AKUNTANSI
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PRASARANA WILAYAH EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban	1,00 Kali	KASUBBID AKUNTANSI PRASARANA WILAYAH EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil Kabupaten	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tak Terduga	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	1,00 Tahun	
		capaian realisasi pembayaran belanja PD	95,00 persen	KEPALA BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	8,00 Dok	KEPALA BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen, SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan daerah	3,00 Jenis	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi ke pusat/provinsi dan Pengelolaan Kas Daerah	3,00 Kali	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN KAS DAERAH
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi	70,00 Laporan	KASUBBID BELANJA LANGSUNG
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D yang sesuai standar	6.954,00 SP2D	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN KAS DAERAH
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Juklak	1,00 Dokumen	KASUBBID BELANJA LANGSUNG
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	7,00 Dok	KEPALA BIDANG AKUNTANSI
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PRASARANA WILAYAH EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban	1,00 Kali	KASUBBID AKUNTANSI PRASARANA WILAYAH EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil Kabupaten	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tak Terduga	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	1,00 Tahun	
		<i>rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	<i>100,00 persen</i>	KEPALA BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	8,00 Dok	KEPALA BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbup APBD	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2,00 Dokumen	KASUBBID ANGGARAN PRASARANA WILAYAH, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen, SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan daerah	3,00 Jenis	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi ke pusat/provinsi dan Pengelolaan Kas Daerah	3,00 Kali	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN KAS DAERAH
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen laporan (Dana Transfer) yang terverifikasi	70,00 Laporan	KASUBBID BELANJA LANGSUNG
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah SP2D yang sesuai standar	6.954,00 SP2D	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN KAS DAERAH
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen Juklak	1,00 Dokumen	KASUBBID BELANJA LANGSUNG
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	7,00 Dok	KEPALA BIDANG AKUNTANSI
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperda, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID AKUNTANSI PRASARANA WILAYAH EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban	1,00 Kali	KASUBBID AKUNTANSI PRASARANA WILAYAH EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil Kabupaten	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tak Terduga	1,00 Tahun	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa	1,00 Tahun	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah</i>	<i>90,00 persen</i>	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dokumen pengelolaan barang milik daerah	14,00 Dok	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen SSH, ASB dan AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)	3,00 Dokumen	KASUBBID PERENCANAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN ASET
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Draf Standar Belanja dan Standar Kebutuhan BMD	1,00 Dokumen	KASUBBID PERENCANAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN ASET
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD	1,00 Dokumen	KASUBBID PERENCANAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN ASET
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Pengelolaan BMD	1,00 Dokumen	KASUBBID PERENCANAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN ASET
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	6,00 Laporan	KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD	6,00 Laporan	KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilaksanakan pengamanan	587,00 Unit	KASUBBID PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Temilainya BMD	1,00 Paket	KASUBBID PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	4,00 Kali	KASUBBID PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4,00 Paket	KASUBBID PEMBERDAYAAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	4,00 Kali	KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD Semesteran	1,00 Dokumen	KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,00 Kali	KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>persentase realisasi PAD</i>	<i>100,00 persen</i>	KEPALA BIDANG PENDAPATAN
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	21,00 Dok	KEPALA BIDANG PENDAPATAN
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID PERENCANAAN DAN PENETAPAN
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen kajian Pajak Daerah	1,00 Dokumen	KASUBBID PERENCANAAN DAN PENETAPAN
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah	4,00 Kali	KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1,00 Paket	KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah Baru	15.000,00 Obyek Pajak	KASUBBID PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak daerah yang akurat	1,00 Unit	KASUBBID PENAGIHAN DAN KEBERATAN
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Obyek PBB P2 dan BPHTB di Kabupaten Kudus	3,00 Dokumen	KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	300.000,00 Dokumen	KASUBBID PERENCANAAN DAN PENETAPAN
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelaksanaan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	18.000,00 Kali	KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5.000,00 Dokumen	KASUBBID PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	1,00 Laporan	KASUBBID PENAGIHAN DAN KEBERATAN
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20,00 Dokumen	KASUBBID PENAGIHAN DAN KEBERATAN
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4,00 Kali	KASUBBID PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3,00 Kalf	KASUBBID PERENCANAAN DAN PENETAPAN